

BAB IV

PERJUANGAN KOMISARIS POLISI M. JOESOEUF MARTADILAGA

DALAM MELAWAN AGRESI MILITER BELANDA DI BANTEN TAHUN

1946-1949 M

A. Konsep Perang Gerilya di Banten

Menurut Koentjaraningrat, mengatakan bahwa konsep atau pengertian adalah unsur pokok di dalam suatu penelitian, kalau masalah dan kerangka teorinya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai hal yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep yang sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu.¹

Daerah Banten sebagaimana halnya dengan daerah Indonesia lainnya tidak terlepas dari pada penindasan dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintahan militer Belanda. Dimana-mana rakyat hidup serba kekurangan di beberapa daerah minus malah sudah menderita kelaparan, pengiriman beras dari suatu kecamatan ke kecamatan lainnya malah dilarang oleh pemerintah Belanda, jika terdapat pelanggaran, maka berasnya akan dirampas. Demikianlah keadaannya, rakyat yang menanam padinya, penjajah dengan angkatan perangnya yang memakannya. Rakyat sendiri dianggap cukup makan jagung atau singkong saja.

¹ Koentjaraningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat/Redaksi Koentjaraningrat*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.) P. 15

Tidak mengherankan jika hal tersebut mengakibatkan merosotnya kesehatan rakyat Banten, sedangkan obat-obatan untuk pencegahan atau pengobatan penyakit sangat kurang atau malah tidak ada sama sekali. Malaria, disentri, busung lapar merajalela dimana-mana yang diakibatkan dari makanan yang tidak bergizi.²

Berhubung serangan tentara Belanda telah diperkirakan akan terjadi lagi, maka TNI dan Aparat Pemerintahan mengadakan persiapan-persiapan. Belajar dari pengalaman agresi militer Belanda pertama, maka sistem pertahanan linier³ diganti dengan sistem perang wilayah (wehrkreise), yang pada pokoknya membagi daerah pertempuran dalam lingkaran-lingkaran yang dapat berdiri sendiri. Dalam segi militer, konsep strategi ini dilengkapi dengan taktik perang gerilya. Selain itu pasukan-pasukan yang sebelumnya hijrah akibat dari persetujuan Renville, harus menyusup ke daerah musuh untuk kembali ke daerah asalnya. Rencana itu tertuang dalam intruksi Panglima Besar TNI tanggal 9 November 1948 yang dikenal dengan “Perintah Siasat No. 1” yang isinya anatar lain sebagai berikut :

1. Pertama, perintah untuk memperlambat gerak maju atau serangan Belanda, pengungsian, dan bumi hangus secara total.

² Letkol. Purn. T. Soenji, Dkk, Sejarah Perjuangan Brigade Tirtayasa Di Daerah Banten 1945-1950, (Serang, : LVRI Prov Banten. 1980). P. 1-2

³ Sistem pertahanan linier adalah sistem pertahanan konvensional. Dalam sistem ini pasukan pasukan yang bertahan berada pada pos-pos yang diperkuat untuk mempertahankan suatu daerah dari kemungkinan dari serangan musuh.(KBBI) Offline

2. Kedua, tugas membuat kantong-kantong perlawanan di setiap kewedanan militer.

Belanda tetap menuntut penghapusan TNI, salah satu atribut kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia yang utama. Belanda sangat tangkas melakukan perang total, walaupun ada gencatan senjata. Mereka terus menyerang dibidang politik dan ekonomi untuk meruntukkan republik. Belanda hendak menghapuskan TNI dengan politik.⁴

Aparat pemerintah sipil telah diperingatkan oleh pimpinan militer agar siap menghadapi segala kemungkinan. Serangan militer Belanda yang telah diperkirakan akan datang. Pada tanggal 19 Desember 1948 tentara Belanda dibawah pimpinan Letnan Jendral Spoor melancarkan agresi militer ke duanya di Yogyakarta. Yogyakarta ibu kota pemerintah Republik Indonesia, diserang dan diduduki. Pimpinan-pimpinan Republik Indonesia termasuk presiden Soekarno dan wakil presiden Mohammad Hatta ditawan. Gerakan militer Belanda berjalan dengan cepat, kota-kota penting dapat dikuasai oleh Belanda.

Setelah Belanda melancarkan aksi agresi militer Belanda ke II nya, Divisi Siliwangi segera pula mulai melakukan gerakan “Wingatonya” dan Panglima Besar Sudirman mengeluarkan “ Perintah Siasat No. 1” dengan kode aloha melalui radio RRI Yogyakarta. Letnan Kolonel Daan Yahya sebagai kepala staf divisi segera pergi

⁴ Suharto, *Banten Masa Revolusi 1945-1949* , p.178

ke Istana untuk melaporkan bahwa Siliwangi akan memulai gerakan kembali ke Jawa Barat sebagaimana telah ditentukan dalam perintah Perintah Siasat No. 1.⁵

Banten, suatu daerah yang tidak diserang dan diduduki Belanda melalui agresi militer Belanda pertamanya, akhirnya Banten diserang tentara Belanda. Serangan terhadap Banten dilakukan oleh Brigade Infanteri I Divisi 7 Desember yang berkekuatan sekitar 1.000 personil dengan senjata lengkap dan di bawah pimpinan Kolonel Blanken. Tentara Belanda bergerak dalam dua fase. Fase pertama mereka menyerbu secepat mungkin mengikuti jalan raya untuk menduduki kota-kota dan pusat-pusat perhubungan. Pada fase kedua mereka melancarkan operasi pembersihan sektor demi sektor kekuatan TNI. Selanjutnya Belanda membentuk pemerintahan sipil dan merehabilitasi jalan yang rusak.

Sebelum Belanda memasuki kota Serang, sekitar pukul 09.00 pagi Belanda menyebarkan famplet sebagai tanda bahwa Belanda akan datang di Serang. Famplet tersebut berisikan tentang tawaran-tawaran menarik untuk semua kalangan. Famplet yang ditandatangani oleh Jenderal Spoor yang isinya tentang sambutlah kami dengan baik karena kami datang dengan membawa tujuan baik untuk semua kalangan.⁶

⁵ A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan I...*, p. 318-319

⁶ Famplet pertama ditujukan kepada rakyat Banten yang taat beragama (Islam) bahwa Belanda akan menyediakan kapal-kapal untuk menghantarkan rakyat naik haji, famplet kedua ditujukan untuk pegawai negeri sipil, agar para pamong praja tetap bekerja dengan tetap dan tenang dan famplet yang ketiga ditujukan kepada tentara dan polisi untuk meletakkan senjata.

Sekitar pukul 13.00 Belanda memasuki Kota Serang diawali dengan pasukan Kavaleri, Panser, tank dan mobil-mobil yang mengangkut pasukan dan perlengkapan senjata. Pada pukul 15.00 karena tanpa ada perlawanan karena TNI telah mundur maka Belanda berhasil menduduki Serang. Masuknya Belanda ke Serang membuat keadaan menjadi kacau.

Setelah berhasil menduduki Serang, Belanda mulai melakukan penyebaran pasukannya untuk memasuki kepedalaman desa dengan tujuan untuk memberantas atau membunuh para pejuang dan TNI, salah satu tempat yang dituju oleh Belanda adalah Gunung Gedor yang berlokasi di daerah Cibitung. Gunung Gedor merupakan salah satu pedesaan yang di incar Belanda karena tempat tersebut merupakan markas dari para pejuang Banten dan TNI, maka dari itu Belanda beserta pasukannya mendatangi tempat tersebut.

B. Komisaris Polisi M. Joesoef Martadilaga Sebelum Agresi Militer Belanda Tahun 1946-1949 M.

Pada masa pendudukan Jepang, polisi sebagai alat perlengkapan pemerintah membantu usaha peperangan dan turut dalam pertahanan penjagaan dari serangan musuh. Penyelenggaraan keamanan dalam negeri juga ditujukan kepada usaha preventif.⁷ Segala sesuatu diurus oleh penguasa militer, tetapi ada bidang yang perlu diperhatikan oleh entara pendudukan Jepang, yakni persoalan ketertiban dan

⁷ Putri Indah L. Jurnal Sejarah “Peran Polisi Dalam Perang Kemerdekaan II Di Surakarta Tahun 1948-1949” (Universitas Negeri Jogjakarta : 2016). P. 1-2

keamanan masyarakat dari berbagai tindak pidana kriminal. Oleh karena itu, dibentuklah Pasukan Polisi Istimewa (Tokubetsu Keisatsu Tai) yang merupakan kesatuan berbobot tempur militer, sehingga polisi pada masa itu pun dilengkapi dengan senjata oleh tentara Jepang.

Pada akhirnya, polisi menjadi suatu kekuatan penting dalam kekuatan tempur Indonesia di masa berikutnya. Polisi diperkuat dengan mantri polisi dan pamong praja karena pamong praja dimasukkan dalam dinas polisi. Berita kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya mampu menumbuhkan semangat rakyat Indonesia melucuti tentara Jepang.⁸

Setelah proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, Kepolisian Indonesia memasuki sebuah era baru, yakni dapat mengatur sistem organisasi sendiri. Namun ini tidak dapat diartikan bahwa pada saat itu keadaan telah membaik sepenuhnya. Oleh karena itu, timbullah revolusi fisik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Dalam situasi yang demikian, hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami kekacauan dan kecemasan yang membaaur menjadi satu dengan pekik dan sorak-sorai kemerdekaan. Seiring situasi keamanan nasional yang semakin mencekam, maka pemerintah pusat Presiden Soekarno pada tanggal 5 Oktober 1945,

⁸ Putri Indah L. Jurnal Sejarah “Peran Polisi Dalam Perang Kemerdekaan II Di Surakarta Tahun 1948-1949” (Universitas Negeri Jogjakarta : 2016). P. 3-4

mengeluarkan dekrit berisi peleburan Badan Keamanan Rakyat (BKR) menjadi organisasi ketentaraan resmi yang bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR).⁹

Masa Perang Kemerdekaan II peran militer tersebut dipentingkan tidak hanya oleh TNI tetapi polisi juga bergerak untuk membela kemerdekaan Republik Indonesia. Perkembangan Kepolisian Banten pada masa revolusi cukup menarik untuk dilihat lebih jauh dalam perspektif sejarah. Berbagai peristiwa besar yang berskala nasional, dan juga internasional memberi pengaruh pada situasi dan kondisi Kepolisian Banten, baik sebagai institusi maupun alat negara. Dalam sejarah Indonesia, aspek militer menjadi bagian penting, namun polisi sepertinya tidak banyak disebutkan dengan baik, padahal kontribusi mereka cukup menentukan situasi dan kondisi suatu masyarakat.

Melalui Perjanjian Renville, terbentuklah negara federal di Indonesia yang kemudian mendapat pertentangan dari pihak republik Indonesia. Pada situasi yang demikian, polisi (termasuk polisi di Keresidenan Banten) merupakan bagian dari perjuangan kemerdekaan sekaligus sebagai alat negara untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di Banten. Kepolisian Banten menjadi bagian terpenting dari masa revolusi di Jawa Barat. Polisi Keresidenan Banten mengambil bagian sebagai alat negara untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

⁹ Putri Indah L. Jurnal Sejarah “Peran Polisi Dalam Perang Kemerdekaan II Di Surakarta Tahun 1948-1949”. P. 5-6

Pada awal tahun 1946 oleh pemerintahan Perdana Menteri Syahrir daerah Keresidenan Banten kemudian diangkat seorang tokoh lokal Banten untuk mengemban tugas sebagai Kepala Kepolisian Daerah Banten dengan Pangkat Komisaris Polisi Tingkat I (Satu) dan mendapat tugas untuk membentuk polisi Negara di daerah Keresidenan Banten yang bernama M. Joeseof Martadilaga.¹⁰

M. Joeseof Martadilaga kemudian membawa peralatan persenjataan sebanyak satu Truk yang di bawah dari Kantor Kepala Kopolisian Pusat di Jakarta dan segera membentuk sebuah kepengurusan kepolisian Daerah Keresidenan Banten untuk melaksanakan tugas mengenai keamanan masyarakat sipil dan aparat yang melanggar aturan pemerintah pusat.

Tugas pertama yang dilakukan oleh M. Joeseof Martadilaga selaku sebagai Kepala Kepolisian Keresidenan Banten yang diangkat langsung oleh Perdana Menteri adalah mencari wakil yang bisa diajak berdiskusi dan memiliki pengalaman yang cukup, akhirnya M. Joeseof Martadilaga mengangkat wakil kepala kepolisian yaitu Memed Soegiri Soedibja seorang polisi yang telah mengabdikan dirinya untuk pemerintah Republik Indonesia khususnya di Banten.

Sementara itu, sebelum ibu kota Banten, Serang, diduduki Belanda, Wakil Gubernur Jawa Barat di Banten Mr. Yusup Adiwinata, Residen Banten Akhmad Khatib bersama sebagian besar aparat pemerintah daerah, dan Kepala Kepolisian

¹⁰ Purn. Tb. Sanusi Ma, Dkk, Riwayat Singkat Bapak Kolonel Polisi A Yusuf Martadilaga (alm) dan Bet Langlangbuana, (Pandeglang, 1987). 1

Keresidenan Banten Yusup Martadilaga beserta anak buahnya bersama TNI meninggalkan kota hijrah ke daerah pedalaman (Kemerdekaan harus, 1949; Banten bukan, 1949). Hal serupa dilakukan pula oleh aparat pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak menjelang kedatangan tentara Belanda di daerahnya.

Kedatangan Belanda ke Indonesia pasca proklamasi ditentang oleh seluruh rakyat Indonesia. Aksi tersebut diwujudkan melalui peristiwa heroik di beberapa tempat di Indonesia. Situasi diperparah dengan pembatalan perjanjian Renville dan serangan Agresi Militer ke II oleh pihak Belanda. Perlawanan dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali kesatuan polisi. Berdirinya kepolisian berpengaruh pada kekuatan militer pertahanan dan sebagai tugas untuk menjaga keamanan.¹¹

Agresi militer Belanda kedua ke Daerah Banten telah diantisipasi oleh pemimpin-pemimpin setempat, baik oleh kalangan sipil maupun militer. Oleh karena itu sebelum Serang sebagai ibukota keresidenan Banten, di serang dan diduduki oleh Belanda, wakil gubernur Jawa Barat Joesoef Adiwinata, residen Banten K.H. Ahmad Chatib, bersama sebagian besar aparat pemerintah Daerah dan kepala polisi keresidenan Banten Joesoef Martadilaga, beserta anak buahnya meninggalkan kota untuk mengungsi ke daerah pedalaman bersama TNI.¹² Hal serupa juga dilakukan

¹¹¹¹ Putri Indah L. Jurnal Sejarah “Peran Polisi Dalam Perang Kemerdekaan II Di Surakarta Tahun 1948-1949” (Universitas Negeri Jogjakarta : 2016). P. 1

¹² Sin Po, 4 dan 6 januari,

oleh aparat pemerintahan di kabupaten Pandeglang dan kabupaten Lebak menjelang kedatangan tentara Belanda di daerahnya.

Pemerintah Daerah Keresidenan Banten tidak menyerah kepada Belanda meskipun daerahnya banyak diduduki oleh Belanda. Di pedalaman, pemerintah daerah menjalankan pemerintahan semampunya. Para pemimpin pemerintahan daerah berusaha menyusun kembali pemerintahan daerah untuk mengimbangi pemerintah TBA ("Verslag", 1949). Daerah yang dipilih adalah di Pandeglang Selatan. Pusat pemerintahan daerah berpindah-pindah untuk menyelamatkan diri dari serangan Belanda.¹³

Setelah tersusun kembali pemerintah daerah (republik), di Banten ada dua pemerintahan sipil, yaitu pemerintah TBA di kota-kota dan pemerintah daerah (republik) di Banten selatan. Pemerintah daerah di pedalaman juga mendapat dukungan dari orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda. Mereka memberikan bantuan materi kepada para pejuang di pedalaman. Di kota-kota juga ada orang-orang yang berjuang untuk kepentingan republik. Mereka berusaha untuk memasuki Badan Perwakilan Rakyat (BPR) agar tempat itu tidak dimasuki orang-orang yang berpihak pada Belanda. Pemerintah daerah berjuang agar seluruh Keresidenan Banten kembali ke pemerintah RI.

¹³ Dinamika suatu daerah terisolasi : *Banten, antara dua agresi militer Belanda, Laporan Penelitian* (Perpustakaan Universitas Indonesia , 1995), P. 120

Pada tahun 1948 Banten diduduki tentara kerajaan Belanda, Kolonel Polisi Yusuf Martadilaga berangkat ke Banten selatan bergabung dengan TNI melawan tentara Belanda mempertahankan keaulatan Republik Indonesia khususnya di daerah keresidenan Banten.

Pada tanggal 25 september 1949 di desa Dahu Kecamatan Cibaliung Kabupaten Paderang, pasukan dibawah pimpinan Kolonel Polisi Yusuf Martadilaga dengan pasukan Bambu Runcing kira-kira 150 orang menekan agar tidak mengakui konfrensi meja bundar (KMB), akhirnya terjadi pertempuran kemudian Kolonel Polisi Yusuf Martadilaga gugur bersama dengan wakil Residen Banten H.Fatoni, Kapten R. Muhtar Dari MBAD dan 20 anggota polri lainnya.

C. Peranan dan Kontribusi Komisarisi Polisi M. Joesoef Martadilaga Dalam Perang Gerilya Di Banten Masa Agresi Militer Belanda Tahun 1946-1949 M

Fakta sejarah tahun 1945 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, pemerintahan Keresidenan Banten dipegang oleh Alim Ulama. Adapun tokoh-tokoh pemerintahan Republik Indonesia di wilayah Keresidenan Banten :¹⁴

1. Residen Banten : K.H. A. Khatib

¹⁴ Purn. Tb. Sanusi Ma, Dkk, Riwayat Singkat Bapak Kolonel Polisi A Yusuf Martadilaga (alm) dan Bet Langlangbuana, (Pandeglang, 1987). P. 2

2. Wakil Residen Banten : K.H. Fatoni
3. Panglima perang : K.H. Syam'un
4. Wakil panglima perang : H. Rafiudin Satalaksana
5. Kepala kepolisian keresidenan Banten : Agus Yusuf Martadilaga (M. Joeosoef Martadilaga)
6. Wakil kepala kepolisian : Memed Soegiri Soedibja
7. Bupati Kabupaten Pandeglang : K.H. Abdul Halim
8. Kepala kepolisian Kab. Pandeglang : K.H. Arbaen

Ketika Belanda secara serentak melancarkan agresi militernya pertama terhadap wilayah Republik Indonesia tahun 1947, Keresidenan Banten tidak diserang. Pada saat itu, Keresidenan Banten yang terdiri atas Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak hanya diblokade secara ketat sehingga menyulitkan hubungan daerah itu dengan pemerintah pusat Republik Indonesia di Yogyakarta dan daerah lain.

Wilayah Keresidenan Banten baru diserang dan diduduki oleh Belanda melalui agresi militernya yang kedua bulan Desember 1948. Di daerah tersebut kemudian dibentuk pemerintahan sipil baru yang diberi nama *Territoriaal Bestuurs Adviseur* (TBA), berpusat di Serang, mula-mula di bawah pimpinan N. Makkes, kemudian digantikan oleh Mas Asikin Nitiatmaja. Sementara itu, aparat Pemerintah Daerah Banten (republik) di bawah pimpinan Residen Ahmad Khatib menyingkir ke

daerah pedalaman di Banten bagian selatan. Dengan demikian, di Banten terdapat dua pemerintahan sipil yang saling bermusuhan.

Pembentukan pemerintahan sipil TBA dilakukan dengan merekrut pegawai pemerintah daerah setempat, menerima para pelamar, dan mendatangkan tenaga dari Jakarta. Tidak lama setelah pemerintahan terbentuk, muncul pemikiran tentang status Banten pada masa datang. Pemikiran itu muncul dari kaum federalis, tokoh masyarakat, dan pemerintah TBA yang pro-Belanda. Pemikiran-pemikiran itu menghendaki agar Banten tidak masuk wilayah RI.

Pada tanggal 23 desember 1948 barulah belanda mengadakan serangannya ke daerah Banten namun sehari sebelum itu, yakni pada tanggal 22 Desember 1948 M atas perintah brigade seluruh sector bergerak mengadakan serangan terhadap pos-pos belanda di sector balaraja batalyon II/Djaelani menyerang kedudukan-kedudukan belanda di sepanjang garis pertahanan. Kompi sudjito dapat menduduki jalan simpang Bitung dan dapat merampas sebuah kendaraan beserta supirnya Baho.

Kompi sabith berhasil menduduki Curug dan Musuh mengundurkan diri ke Kalapa Dua. Kompi Kasmaran karena terhalang keadaan medan yang sangat terbuka tidak dapat mencapai sasaran namun pertempuran sengit terjadi antar Sepatan – Jati Gintung.

Dalam seranagan balasan Belanda pada tanggal 23 Desember 1948 seluruh pertahanan kita di seluruh sector dapat ditembus pada tanggal 25 Desember 1948

sewluruh kota Kabupaten Serang, Pandeglang dan Rangkasbitung dapat diduduki Belanda, Bataylon III/Sachra dengan tepat dapat mengundurkan diri ke daerah Paheut, kadugedong, dan Bataylon PT, setelah mengadakan pertempuran-pertempuran hambatan dapat pula mengundurkan diri ke daerah Taktakan (padukan pereng) dan sekitarnya. Mulailah Fase “B” (Gerilya).¹⁵

Pada tanggal 10 Agustus 1949, Pemerintah RI dan Pemerintah Belanda mengeluarkan perintah Gencatan Senjata. Setelah gencatan senjata terealisasi oleh kedua belah pihak, terjadi perubahan brigade. Komandan Brigade Letnan Kolonel dr.Eri Soedewo ditarik ke Pusat menjadi Kepala Staf Divisi Siliwangi. Sementara itu, kedudukannya sebagai Komandan Brigade Tirtayasa digantikan oleh Mayor Omon Abdurachman dan Mayor D. Samsu sebagai Kepala Staf. Brigade mendapat nama baru, yaitu Komando Militer Daerah (KMD) V Banten yang terdiri dari tiga Komando Distrik Militer (KDM) yaitu KDM I Serang pimpinan Kapten Ali Amangku, KDM II Pandeglang pimpinan Kapten E.A.Sumardja Adidjaja dan KDM III Lebak, pimpinan Kapten Sholeh Iskandar. Kedudukan Staf Brigade ada di daerah Kadukacang Banten Selatan yang kemudian dipindah ke Serang.

Dalam fase konsolidasi, setelah gencatan senjata, TNI mendapat musuh baru dari bangsa sendiri, yaitu dengan adanya Gerakan Bambu Runcing di Banten Selatan yang dipimpin oleh Chaerul Saleh. Gerombolan itu dalam perjalanannya dari daerah

¹⁵ Letkol. Purn. T. Soenji, Dkk, Sejarah Perjuangan Brigade Tirtayasa Di Daerah Banten 1945-1950, (Serang, : LVRI Prov Banten. 1980). P. 37-38

Bogor ke daerah Cibaliung, Banten Selatan, telah melakukan pembunuhan-pembunuhan. Beberapa prajurit TNI dan beberapa pejabat Pemerintah dan beberapa Pejabat Pemerintah Daerah Banten menjadi korban, diantaranya Wakil Residen Banten KH.Achmad Fathoni, Kepala Polisi Keresidenan Banten Komisaris Polisi Joesoef Martadilaga, Letnan II R.Muchtar, seorang perwira utusan dari Markas Komando Djawa (MBKD), sepuluh orang prajurit TNI dari Sektor XII Malingping dan tujuh orang prajurit TNI dari Sektor XV di Cibaliung. Gerombolan ini akhirnya dapat dihancurkan oleh TNI.

Sementara itu telah dibentuk pula satu dewan pertahanan daerah I Banten dengan susunan anggotanya :¹⁶

- Komandan/daerah pertahanan I : Kolonel K.H. Syam'un disamping itu sebagai Bupati Serang.
- Kepala Staff : Mayor K. Sukanda Bratamanggala
- Anggota : Letkol Adisoendjojo

Letkol laut Misbach (Panglima Pangkalan I ALRI)

Kapten Udara sumandi(komandan pangkalan Udara Gorda)

Kombes Yusuf Martadilaga (Kepala Polisi Keresidenan Banten)

¹⁶ Letkol. Purn. T. Soenji, Dkk, Sejarah Perjuangan Brigade Tirtayasa Di Daerah Banten 1945-1950, (Serang, : LVRI Prov Banten. 1980). P. 27-28

Setelah genjatan senjata dan penyerahan daerah Banten kembali dari pihak Belanda diadakan pergantian pimpinan dan perubahan-perubahan organisasi disesuaikan kepada perkembangan situasi dan kondisi.

Didalam fase konsolidasi ini, dalam suasana genjatan senjata dengan musuh pihak Belanda, terjadi suatu peristiwa yang sangat menyedihkan di daerah cibaliung (Banten Selatan). Beberapa prajurit TNI dan pejabat-pejabat pemerintahan sipil telah di bunuh sebara kejam oleh gerombolan “Bambu Runcing” pimpinan Chaerul Saleh, Muhdin Nasution, dll.

Diantara korban keganasan gerombolan tersebut terdapat :¹⁷

- Kh. Ahmad Fatoni, Wakil Residen Banten
- Yusuf Martadilaga, Komisaris Polisi, Kepala Polisi keresidenan Banten
- Letda Muchtar, seorang utusan dari pemerintahan pusat Yogyakarta
- 10 orang prajurit pimpinan Sersan Hasan dari sector XIII, 7 orang bintara dan prajurit pimpinan L.M. Suharto dari sector XV.

Peristiwa tersebut terjadi bagaikan halilintar di siang hari bolong dan merupakan anti klimaks dari suasana kegembiraan dan kedamaian gencatan senjata.

“*Stoot-Troep*” pimpinan Lettu Djambar Wardana digerakkan untuk pengejaran dan penghancuran gerombolan tersebut¹⁸. Gerakan operasi tersebut

¹⁷ Letkol. Purn. T. Soenji, Dkk, Sejarah Perjuangan Brigade Tirtayasa Di Daerah Banten 1945-1950, (Serang, : LVRI Prov Banten. 1980). P. 44

dilaksanakan melalui cibaliung – cibadak - Air jeruk - Air Mokla dan terjadi beberapa pertempuran.

Dari batalyon Kosasih digerakkan 2 kompi pasukan dari selatan melalui Cisolok-Cobareno - Cikotok – Bayah terus ke daerah Cibaliung, ialah kompi Kapten Tarmat dan Kapten suripto. Dari Batalyon Darsono bergerak pasukan melalui Menes, Labuan menuju Cibaliung. Gerombolah “Bambu Runcing” tersebut sebagian besar dapat dihancurkan.

Periode konsolidasi ini ditandai dengan penyusunan kembali pasukan dalam segi personal dan material dan pembentukan sarana-sarana territorial, dan yang paling pokok adalah mengkonsolidasikan unsur manusia prajuritnya dalam segi moril dan mental, sebab bagaimanapun juga kita telah sama-sama membuktikan, bahwa perang bukan dimenangkan oleh unsur persenjataanya melainkan oleh kemampuan unsur manusianya.¹⁹

Pasca wafatnya M. Joesoef Martadilaga, bersama dengan wakil residenan Banten KH. Fatoni serta dari kalangan Militer Kapten R. Muhtar dari MBAD dan anggota Polri lainnya sebanyak 20 terbunuh oleh pasukan Bambu Runcing (BR)

¹⁸ Bambu Runcing (BR)

¹⁹ Letkol. Purn. T. Soenji, Dkk, Sejarah Perjuangan Brigade Tirtayasa Di Daerah Banten 1945-1950. P. 46

sebanyak 150 orang menekan agar tidak mengakui konferensi Meja Bundar (KMB), kemudian pimpinan kepolisian Keresidenan Banten dijabat oleh diantaranya :²⁰

1. Komisaris Polisi Tk.I M. Saud Tortasnjaya (tahun 1950-1953 M)
2. Komisaris Polisi Tk.I Rd. Kandar Karta Manggala (tahun 1954-1956 M)
3. Komisaris Besar Polisi S. D. Harahap (1957-1958 M)
4. Komisaris Besar Polisi Tb. Uteng Martasudarma (tahun 1958-1959 M)
5. Komisaris Besar Polisi Rd. Sumarjo (tahun 1960-1962 M)
6. Komisaris Besar Polisi Sukrman Wikanta Atmadja (tahun 1963-1965 M)

Tugu peringatan yang terdapat di Kp. Dahu Desa Cihanjuang Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang merupakan sebuah penghormatan pemerintah pusat yang dibangun dalam bentuk tugu yang dibangun di tempat meninggalnya/kuburan para jenazah para korban kebingasan Bambu Runcing yang mengakibatkan meninggalnya tokoh penting pejabat pemerintahan Keresidenan Banten.²¹

Dalam melawan penjajah Jepang ataupun penjajah Belanda telah kita buktikan bersama sebagai fakta sejarah bahwa di seluruh Keresidenan Banten, Tangerang Barat dan Bogor Barat. Tentara dan rakyat berjuang bersama-sama, bahu membahu, bersatu padu dan tidak mengenal perbedaan suku, harkat, derajat, ulama

²⁰ Purn. Tb. Sanusi Ma, Dkk, Riwayat Singkat Bapak Kolonel Polisi A Yusuf Martadilaga (alm) dan Bet Langlangbuana, (Pandeglang, 1987). P. 4

²¹ Wawancara Bpk Wakir (Kepala Dusun Kp. Dahu) “Tragedi Cibaliung” diwawancari oleh Anbar Septia Yuningsih di Kediaman Rumahnya Kp. Dahu Desa Cihanjuang Kec. Cibaliung - Pandeglang, pada tanggal 20 Januari 2018, pukul 11.05 WIB.

ataupun jawara. Semua tua muda putra-putri dijiwai semangat juang 45 dengan I'tikad pengeorbanan yang ikhlas lillhai Ta'alla.²²

Tugu peringatan dibuat atas rujukan pemerintah Djawa Barat yang di bangun atas anggaran pemerintah dan dibangun oleh masyarakat sekitar Kp. Dahu dan di diresmikan oleh Kadapol VIII/Djawa Barat/LLB Brigdjen Polisi Drs. M.A. Soegiri Soedibja pada tanggal 25 September 1971 di Kp. Dahu Desa Cihanjuang Kecamatan Cibaliung Kab. Pandeglang bersama dengan pemerintah pejabat Keresidenan Banten.²³

Menurut penuturan Bapak Januri bahwa Brigdjen Polisi Drs. M.A. Soegiri Soedibja bercerita bahwa seharusnya beliau tidak harus meninggal secara tragis di tempat pedalaman dan seharusnya Brigdjen Polisi Drs. M.A. Soegiri Soedibja yang harus menerima mandate sebagai Kepala Kepolisian Keresidenan Banten namun beliau (M. Joesoef Martadilaga) yang menerima mandatnya karena merasa beliau adalah putra Banten yang harus mengabdikan untuk tanah kelahirannya.

Tugu peringatan yang terdapat di Kp. Dahu Desa Cihanjuang Kecamatan Cibaliung Kab. Pandeglang yang disedikasikan untuk pahlawan Bangsa yang meninggal dalam peperangan melawan penjajah, namun sangat disayangkan

²² Wawancara Bpk Marsudin (Tokoh Masyarakat) “Tragedi Cibaliung” diwawancari oleh Anbar Septia Yuningsih di Kediaman Rumahnya Kp. Dahu Desa Cihanjuang Kec. Cibaliung - Pandeglang, pada tanggal 25 Januari 2018, pukul 11.30 WIB.

²³ Wawancara Bpk Januri (Mantan Kepala Desa) “Tragedi Cibaliung” diwawancari oleh Anbar Septia Yuningsih di Kediaman Rumahnya Kp. Dahu Desa Cihanjuang Kec. Cibaliung - Pandeglang, pada pada tanggal 20 Januari 2018, pukul 13.10 WIB.

kematiannya justru dilakukan oleh bangsa nya sendiri oleh kelompok kiri yang bernama Bambu Runcing (BR) yang disebut oleh masyarakat Cibaliung dikenal dengan nama Tragedi Cibaliung.²⁴

²⁴ Tragedi Cibaliung dikenal oleh masyarakat Cibaliung dengan tugu yang berdiri di Kp. Dahu Kecamatan Cibaliung Kab. Pandeglang, dimana terdapat tokoh-tokoh penting keresidenan Banten diantaranya, Wakil Residen Banten, Kepala Kepolisian Keresidenan Banten dan dari anggota Militer dari Bogor yang diutus ke Banten dalam rangka mempertahankan Kedaulatan Kemerdekaan Republik Indonesia.